

**SEKTOR PERTANIAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR  
WILAYAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT**  
*AGRICULTURAL SECTOR AND INTERRUPTION OF INTER-REGIONAL INCOME IN  
WEST SUMATERA PROVINCE*

**Harvi Hamdika<sup>1</sup>, Osmet<sup>2</sup>, Sri Wahyuni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang

<sup>2</sup>Prodi Agribisnis, FapertaUnand, Padang, osmettt@gmail.com

<sup>3</sup>Agribisnis, FapertaUnand, Padang.

Received: 12<sup>th</sup> Februari, 2019; 1<sup>st</sup> Revision: 4<sup>th</sup> Maret, 2019; Accepted: 18<sup>th</sup> April, 2019

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menghitung perbedaan pendapatan daerah di provinsi Sumatera Barat dan tren 20 tahun antara 1995 hingga 2014; dan (2) menganalisis peran sektor pertanian dalam perbedaan pendapatan daerah di provinsi tersebut. Indeks Williamson digunakan untuk menghitung disparitas pendapatan daerah berdasarkan data Produk Domestik Bruto Regional (RGDP) tahunan 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat peran sektor pertanian dalam memengaruhi kesenjangan pendapatan daerah, perbandingan dibuat antara nilai-nilai indeks Williamson yang dihitung dengan dan tanpa kontribusi sektor pertanian dalam RGDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) disparitas pendapatan daerah di Sumatera Barat berfluktuasi antara 1995 dan 2014 tetapi trend keseluruhan cenderung menurun. Indeks Williamson tertinggi adalah pada tahun 2002 sebesar 0,98 sedangkan yang terendah terjadi pada 2014 sebesar 0,26, (2) Sektor pertanian memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan daerah di Sumatera Barat. Analisis uji dua sampel menunjukkan Indeks Williamson yang dihitung tanpa kontribusi sektor pertanian dalam RGDP jauh lebih rendah daripada indeks yang dihitung dengan kontribusi pertanian. Pada analisis Kendall's Tau juga menunjukkan ada hubungan antara kontribusi sektor pertanian dalam RGDP dan nilai indeks Williamson. Secara keseluruhan, tren penurunan kesenjangan pendapatan daerah di Sumatera Barat seiring dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam RGDP.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan (Disparitas), Indeks Williamson, PDRB, Peran Sektor Pertanian

**Abstract**

*The objectives of this study are to (1) calculate the regional income disparity in the province of West Sumatra and its 20 years trend between 1995 to 2014; and (2) analyze the role of agriculture sector in regional income disparity in the province. Williamson index is used to calculate regional income disparity based on data on yearly Regional Gross Domestic Product (RGDP) of 12 districts and 7 municipalities within the province of West Sumatra. To see the role of agricultural sector in influencing regional income disparity, comparison is made between the values of Williamson index calculated with and without agricultural sector's contribution in RGDP. The results show that (1) regional income disparity in West Sumatra has been fluctuating between 1995 and 2014 but overall trend has been declining. The highest Williamson Index is in 2002 at 0.98 while the lowest occurred in 2014 at 0.26, (2) Agricultural sector has quite a significant role in reducing regional income disparity in West Sumatra. Further analysis using two related samples test confirms that Williamson Index calculated without agricultural sector contribution in RGDP is significantly lower than index calculated with agricultural contribution. Analysis employing Kendall's Tau also confirms the association between the contribution of agricultural sector in RGDP and the value of Williamson index. Over all, the declining trend of regional income disparity in West Sumatra coincides with the increasing contribution of agricultural sector in the RGDP.*

**Keywords:** *Inequality of Income (Disparity), Williamson Index, RGDP, Role of Agriculture Sector*

## PENDAHULUAN

Kinerja pembangunan suatu negara atau suatu wilayah dalam suatu negara tidak bisa dilihat hanya dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) saja. Sudah sejak lama proses pembangunan juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antar penduduk dan antar wilayah (pada aras internasional mau pun nasional). Ilmu ekonomi regional terutama mencoba memahami yang terakhir ini. Antara lain, para ahli ekonomi regional mencoba memahami mengapa terdapat perbedaan antar wilayah dalam berbagai parameter kinerja pembangunan; mengapa suatu negara atau daerah lebih maju atau tertinggal dari negara atau daerah lain (lihat misalnya Todaro dan Smith 2003, dan Arsyad 2010). Pemahaman mengenai ini akan menunjukkan jalan bagi upaya pembangunan yang mendorong kearah pengurangan ketimpangan atau peningkatan pemerataan antar daerah atau antar negara yang merupakan salah satu sasaran ideal pembangunan ekonomi.

Secara garis besar, transformasi perekonomian sebagai akibat proses pembangunan cenderung memperkecil kontribusi nisbi sektor pertanian dan memperbesar kontribusi sektor non-pertanian, terutama sektor-sektor industri dan jasa, dalam PDB suatu negara atau daerah. Bisa dikatakan sudah menjadi konsensus para ahli bahwa masa depan perekonomian akan bertumpu pada sektor-sektor modern ini. Walau pun demikian, pembangunan pertanian tetap harus diupayakan, terutama di negara-negara dengan sektor pertanian yang besar seperti Indonesia, karena sektor pertanian tetap penting sebagai penghasil pangan, bahan mentah, sumber devisa dan, terutama di pedesaan, sebagai penyedia lapangan kerja. Hanya saja, upaya ini akan sulit menghindar dari masalah paradoks pembangunan pertanian, yang berarti keberhasilan pembangunan pertanian justru ditandai oleh penurunan nilai produk pertanian itu sendiri (Timmer 1998, Osmet 2016), yang cenderung menekan pendapatan dan kesejahteraan di sektor pertanian nisbi terhadap sektor-sektor non-pertanian. Kecenderungan ini mengisyaratkan bahwa daerah dengan sektor pertanian yang dominan akan tertinggal dari pada daerah lain yang di dominasi sektor non-pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang menjelaskan ketimpangan antar wilayah dalam suatu negara atau propinsi. Namun demikian, kalau sektor pertanian membesar di wilayah-wilayah dalam suatu negara atau provinsi, bisa saja ketimpangan menjadi berkurang terutama di wilayah-wilayah dimana sektor non-pertanian tidak terlalu berkembang.

Di provinsi Sumatera Barat, kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup besar (lebih dari 20 persen), lebih besar dari rata-rata nasional yang sudah mendekati angka 10 persen. Kalau dilihat pada aras wilayah (kabupaten/kota), kontribusi sektor pertanian bervariasi. Di kabupaten-kabupaten, kontribusi sektor pertanian bervariasi dari sekitar 20 persen lebih hingga mendekati 50 persen. Di kota-kota, kontribusi sektor pertanian sangat kecil, umumnya di bawah 10 persen. Penelitian ini ingin memperlihatkan tingkat ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Barat dan menjawab pertanyaan apakah sektor pertanian berperan dalam ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat serta memperlihatkan bagaimana fenomena ini berubah dalam selang waktu 20 tahun terakhir. Yang terakhir ini menjadi menarik untuk dilihat mengingat tesis yang mengatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat di awal masa pembangunan dan menurun sejalan dengan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

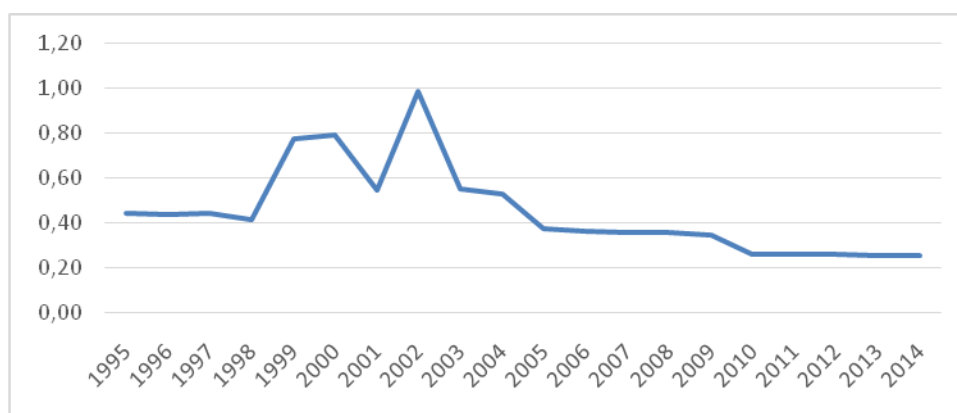
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia di BPS Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data yang secara garis besar terkait dengan PDRB provinsi Sumatera Barat serta PDRB 12 Kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat untuk selang waktu 20 tahun (1995 hingga 2014). Indeks Williamson (biasa ditulis CVw) digunakan sebagai alat ukur ketimpangan antar wilayah. Semakin besar angka Indeks Williamson maka semakin besar pula tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi, begitu pula sebaliknya (Tambunan, 2003). Indeks Williamson diukur per tahun. Peranan sektor pertanian dilihat dengan cara menghitung Indeks Williamson dengan dua cara. Indeks Williamson pertama-tama dihitung

dengan memasukkan sektor pertanian dalam formula penghitungan dan kemudian Indeks Williamson kembali dihitung dengan mengeluarkan sektor pertanian dari formula. Perbedaan angka Indeks Williamson pada dua perhitungan tersebut mengindikasikan peran sektor pertanian dalam ketimpangan antar wilayah dalam provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Barat

Perhitungan Indeks Williamson untuk provinsi Sumatera Barat selama 20 tahun terakhir memperlihatkan bahwa ketimpangan antar wilayah di provinsi ini berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam selang waktu 1995 hingga 2014. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, angka Indeks Williamson bervariasi antara lebih dari 0,2 hingga lebih dari 0,9. Indeks ketimpangan berada pada aras moderat pada awalnya lalu meningkat tajam (yang mengindikasikan peningkatan ketimpangan) pada tahun-tahun awal abad ke 21 (tahun-tahun awal era reformasi), lalu cenderung menurun ke aras yang cukup rendah pada tahun-tahun akhir. Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat cenderung menurun dalam selang waktu yang diteliti ke aras yang cukup rendah (Gambar 1). Ini mengindikasikan perbaikan pemerataan antar wilayah di Sumatera Barat dalam tahun-tahun terakhir data yang dianalisis.



**Gambar 1.** Indeks Ketimpangan antar Wilayah di Sumatera Barat (1995-2014)

**Tabel 1** :Indeks Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 1995-2014

No.	Tahun	CVw
1	1995	0,45
2	1996	0,44
3	1997	0,45
4	1998	0,42
5	1999	0,78
6	2000	0,80
7	2001	0,55
8	2002	0,99
9	2003	0,56
10	2004	0,54
11	2005	0,38

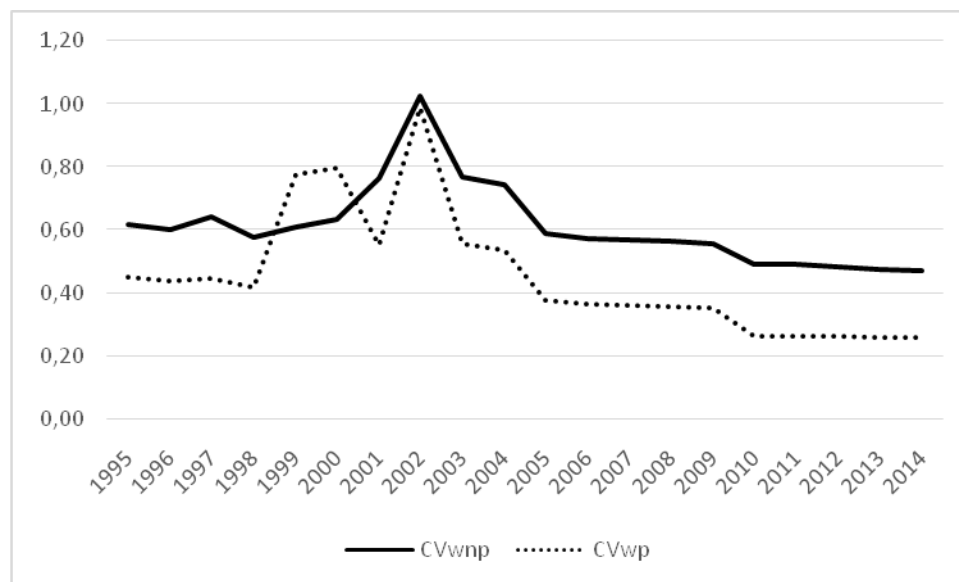
12	2006	0,36
13	2007	0,36
14	2008	0,36
15	2009	0,35
16	2010	0,26
17	2011	0,26
18	2012	0,26
19	2013	0,26
20	2014	0,26

### Sektor Pertanian dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Barat

Hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa angka indeks ketimpangan (CVw) dengan mengikut sertakan PDRB sektor pertanian dalam perhitungan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan indeks ketimpangan pamengikut sertakan PDRB sektor pertanian. Perbedaan ini bisa dilihat dengan lebih jelas pada Gambar 2. Kecuali pada dua tahun (1999 dan 2000), angka CVwp (indeks ketimpangan dengan sektor pertanian) secara konsisten lebih rendah dari pada CVwnp (indeks ketimpangan tanpa sektor pertanian). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dapat menekan atau mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode analisis (1995-2014).

**Tabel 2:**Peranan Sektor Pertanian terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun (1995-2014).

No.	Tahun	CVwnp	CVwp	Sektor Pertanian (Rp)
1	1995	0,62	0,45	1482442,23
2	1996	0,60	0,44	1586124,30
3	1997	0,64	0,45	1609290,49
4	1998	0,58	0,42	1586070,49
5	1999	0,61	0,78	1636619,21
6	2000	0,63	0,80	1645577,41
7	2001	0,76	0,55	5648004,31
8	2002	1,02	0,99	6091915,61
9	2003	0,77	0,56	6557510,72
10	2004	0,74	0,54	6937172,92
11	2005	0,59	0,38	7293205,65
12	2006	0,57	0,36	7658394,83
13	2007	0,57	0,36	8038919,12
14	2008	0,56	0,36	8478980,94
15	2009	0,55	0,35	8773503,00
16	2010	0,49	0,26	27277723,89
17	2011	0,49	0,26	28535019,88
18	2012	0,48	0,26	29284904,64
19	2013	0,48	0,26	30285588,61
20	2014	0,47	0,26	32060683,70



**Gambar 2.**Perbandingan Antara Indeks Williamson Tanpa Mengikuti sertakan Sektor

### **PDRB sektor Pertanian (CVwnp) dan Indeks Williamson dengan Mengikuti sertakan Sektor Pertanian (CVwp)**

Setelah dicermati (Tabel 2), perkembangan pada periode analisis terlihat bahwa jika sumbangan sektor pertanian besar maka indeks ketimpangan akan rendah, begitu pula sebaliknya jika sumbangan sektor pertanian kecil maka ketimpangan akan tinggi. Pada tahun 2014 ketimpangan yang terjadi sebesar 0,26 (merupakan nilai indeks ketimpangan terkecil selama periode analisis), dengan PDRB sektor pertanian pada tahun tersebut adalah sebesar 320 milyar rupiah (merupakan kontribusi terbesar sektor pertanian dalam PDRB selama periode analisis). Bukti ini semakin memperkuat dugaan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat

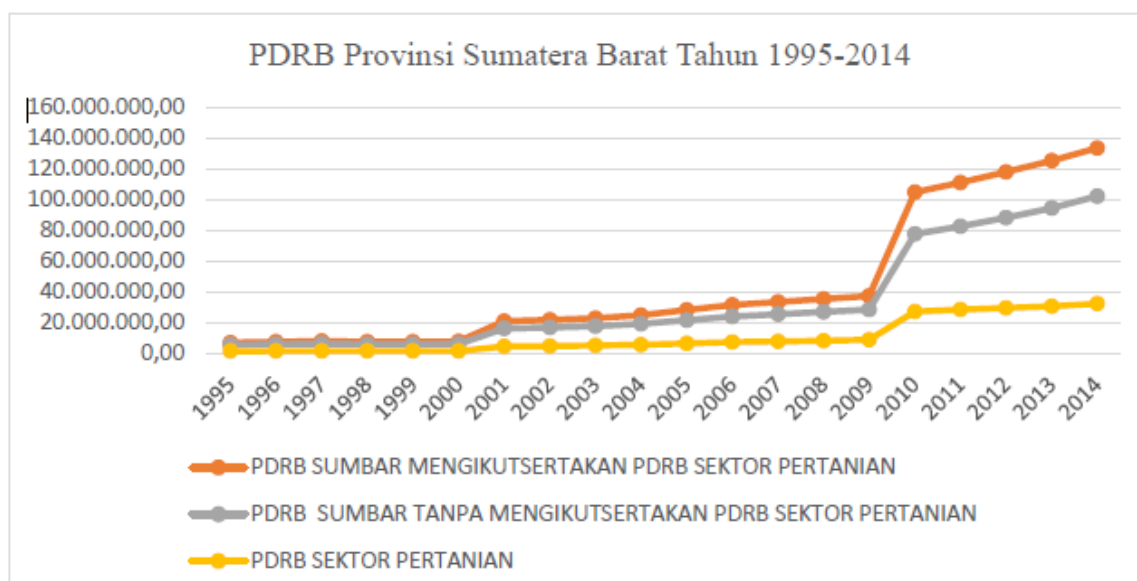
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada masa-masa krisis moneter yang terjadi di penghujung abad ke 20 yang lalu di Indonesia, indeks ketimpangan antar wilayah di Sumatera Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 ke tahun 1999 indeks ketimpangan dengan mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup tajam, ketimpangan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2000. Kondisi ini, menurut sebuah sumber, kemungkinan berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih berfokus pada penyehatan sektor keuangan yang merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang kecil. Indeks ketimpangan pada tahun 2002 kembali mengalami peningkatan sekaligus indeks ketimpangan dengan mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian tertinggi. Kemudian indeks ketimpangan mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Untuk melihat signifikansi perbedaan antara besarnya tingkat ketimpangan dengan memasukkan PDRB sektor pertanian (CVwp) dan besarnya tingkat ketimpangan tanpa memasukkan PDRB sektor pertanian (CVwnp) dalam perhitungan, maka dilakukan uji dua nilai tengah berpasangan. Uji ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara indeks ketimpangan tanpa mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian (CVwnp) indeks ketimpangan dengan mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian (CVwp) atau  $CVwnp > CVwp$ . Artinya indeks ketimpangan tanpa mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian (CVwnp) nilainya lebih besar daripada indeks ketimpangan dengan mengikuti sertakan PDRB sektor pertanian (CVwp).

Untuk melihat hubungan antara variabel yang dianalisis (PDRB sektor pertanian dan indeks ketimpangan) dilakukan analisis korelasi Kendall. Analisis korelasi ini memberikan angka sebesar -0,635

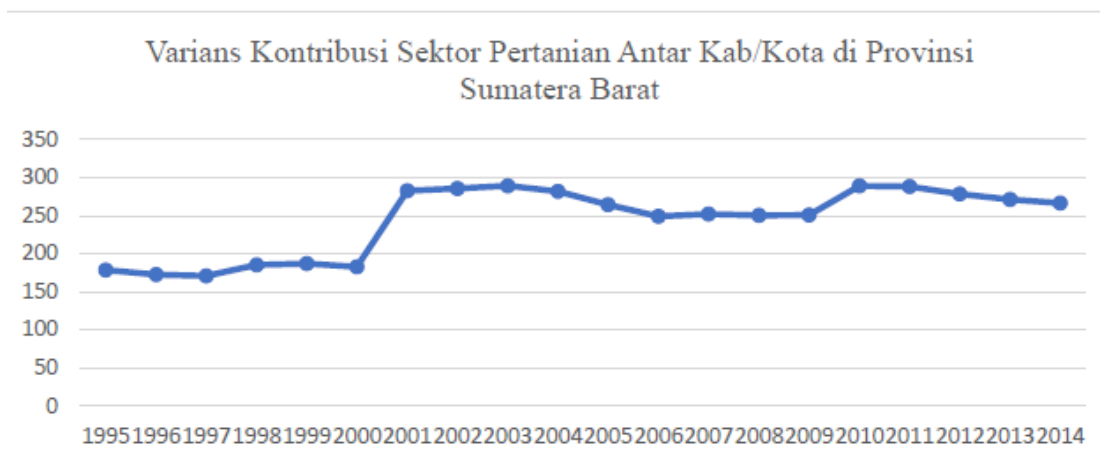
yang memperlihatkan asosiasi yang erat dan negatif antara PDRB sektor pertanian dengan indeks ketimpangan. Artinya, ada kecenderungan bahwa semakin besar kontribusi sektor pertanian maka tingkat ketimpangan pendapatan akan semakin kecil yang berarti distribusi pendapatan antar wilayah semakin merata.

Peranan sektor pertanian juga dapat diamati berdasarkan perhitungan yang dilakukan selama 20 tahun terakhir (periode analisis 1995-2014). Dimana penulis melakukan perbandingan *trend* PDRB Sumatera Barat mengikutsertakan sektor pertanian, PDRB Sumatera Barat tanpa mengikutsertakan sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian (Gambar 3). Secara kasatmata, PDRB Sumatera Barat mengikutsertakan PDRB sektor pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Sumatera Barat tanpa mengikutsertakan sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian. Hal ini membuktikan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat memiliki kontribusi yang cukup besar



**Gambar 3.** PDRB Sumatera Barat mengikutsertakan sektor pertanian, PDRB Sumatera Barat tanpa mengikutsertakan sektor pertanian dan PDRB sektor pertanian

Penulis juga melakukan perhitungan varians antar kabupaten/kota dalam hal kontribusi sektor pertanian di PDRB selama 20 tahun terakhir. Tujuannya untuk mengukur keberagaman data kontribusi sektor pertanian antar kabupaten/kota per tahunnya. Jika nilai variansnya tinggi artinya terdapat *range* yang lebar antara kontribusi sektor pertanian antar kabupaten/kota yang dominan sektor pertaniannya dengan kontribusi sektor pertanian di kabupaten/kota yang tidak dominan sektor pertaniannya, begitupun sebaliknya. Setelah dilakukan analisis (Gambar 4) terlihat bahwa varians antar kabupaten/kota dalam hal kontribusi sektor pertanian di PDRB berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan pada setiap tahun dasar (ADHK), yakni varians mengalami penurunan pada tahun 1995-2000 (ADHK 1993), pada tahun 2001-2009 (ADHK 2000) dan pada tahun 2010-2014 (ADHK 2014). Artinya kontribusi sektor pertanian di masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan, hal inilah yang menyebabkan indeks Williamson tanpa mengikutsertakan PDRB sektor pertanian cenderung mengalami penurunan selama periode analisis.



**Gambar 3 :** Varians Kontribusi Sektor Pertanian Antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Analisis data tersebut di atas memperlihatkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Lapangan usaha pertanian juga menjadi penyumbang terbesar diantara lapangan-lapangan usaha lainnya. Data juga memperlihatkan bahwa PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun demikian, peningkatan sektor pertanian tanpa diikuti oleh peningkatan sektor hulu mau pun hilirnya (agroindustri) di daerah yang didominasi oleh sektor pertanian tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi optimal. Oleh sebab itu, diperlukan juga upaya peningkatan pada sektor hulu-hilirnya (agroindustri) agar nilai tambah yang dicapai pada daerah yang didominasi sektor pertanian akan lebih besar. Dengan meningkatnya sektor pertanian didukung oleh peningkatan sub-sektor agroindustri, pertumbuhan ekonomi akan semakin besar, ketimpangan pendapatan antar daerah yang dominan sektor pertaniannya dan daerah yang tidak dominan sektor pertanian juga akan semakin kecil.

### KESIMPULAN

Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi antar waktu dan cenderung semakin menurun selama periode analisis 1995-2014. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 0,98 sedangkan ketimpangan terendah terjadi pada tahun tiga tahun terakhir periode analisis yaitu sebesar 0,26. Sektor pertanian berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan analisis, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan semakin meningkat jika PDRB sektor pertanian dikeluarkan dari perhitungan. Berdasarkan uji dua nilai tengah berpasangan juga memperkuat bukti bahwa indeks ketimpangan dengan mengikut sertakan PDRB sektor pertanian dalam perhitungan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan indeks ketimpangan tanpa mengikut sertakan PDRB sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis korelasi antara PDRB sektor pertanian dan indeks ketimpangan juga didapat bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat antara PDRB sektor pertanian dan Indeks Ketimpangan, artinya peningkatan kontribusi sektor pertanian akan menurunkan ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Dinamika ketimpangan yang semakin menurun di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat dipertahankan. Dengan dinamika ketimpangan yang semakin menurun ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemakmuran di Provinsi Sumatera Barat akan tercapai. Sektor pertanian masih memerlukan dukungan sektor lain (agroindustri) khususnya di daerah pertanian, peningkatan pada sub sektor agroindustri dapat memperlancar aliran barang hulu-hilirnya yang akan meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara merata dapat berjalan sebagaimana mestinya di Provinsi Sumatera Barat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pembimbing Dosen Prodi Agribisnis yang telah membimbing selama pelaksanaan penelitian

### Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN : Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota 1995-2014*. BPS Sumatera Barat : Padang
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat dalam Angka Tahun 1995-2014*. BPS Sumatera Barat : Padang
- Osmet. 2015. *Lingkungan Strategis Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang*. Bahan Diskusi Bulanan Jurusan. Sosial Ekonomi Faperta Unand, Padang.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia. Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Todaro, M. P. Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid ke-1*. Edisi Ke-8. Erlangga : Jakarta.